

# **PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



## **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2020**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 tentang pembentukan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah guna menunjang Pencapaian visi dan misi pemerintahan Bupati terpilih periode 2016-2021. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Sejumlah misi, tujuan strategis, sasaran strategis, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplementasikan demi mencapai misi tersebut.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2016-2021 suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) disusun setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap Indikator Kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Pertanggungjawaban keberhasilan organisasi atas realisasi dalam pelaksanaan pencapaian target tahun 2020 dapat diuraikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Parit Malintang, 26 Januari 2021  
Plt. **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
  
**TASLIM LETER, SE, A.k**  
NIP. 19740715 200212 1 011



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah .....	1
	B. Permasalahan Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah.....	5
	C. Sistematika Pelaporan.....	6
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
	A. Rencana Strategis.....	9
	B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 .....	10
	C. Perjanjian Kinerja .....	11
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
	A. Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah .....	13
	B. Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
	A. Kesimpulan .....	44
	B. Langkah ke Depan .....	45

### LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

**P**emerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berhubungan langsung dengan OPD-OPD di Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada OPD-OPD tersebut.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut maka Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman menyusun laporan berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuapten Padang Pariaman, serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada maka, tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuapten Padang Pariaman adalah :

**“ Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah “**

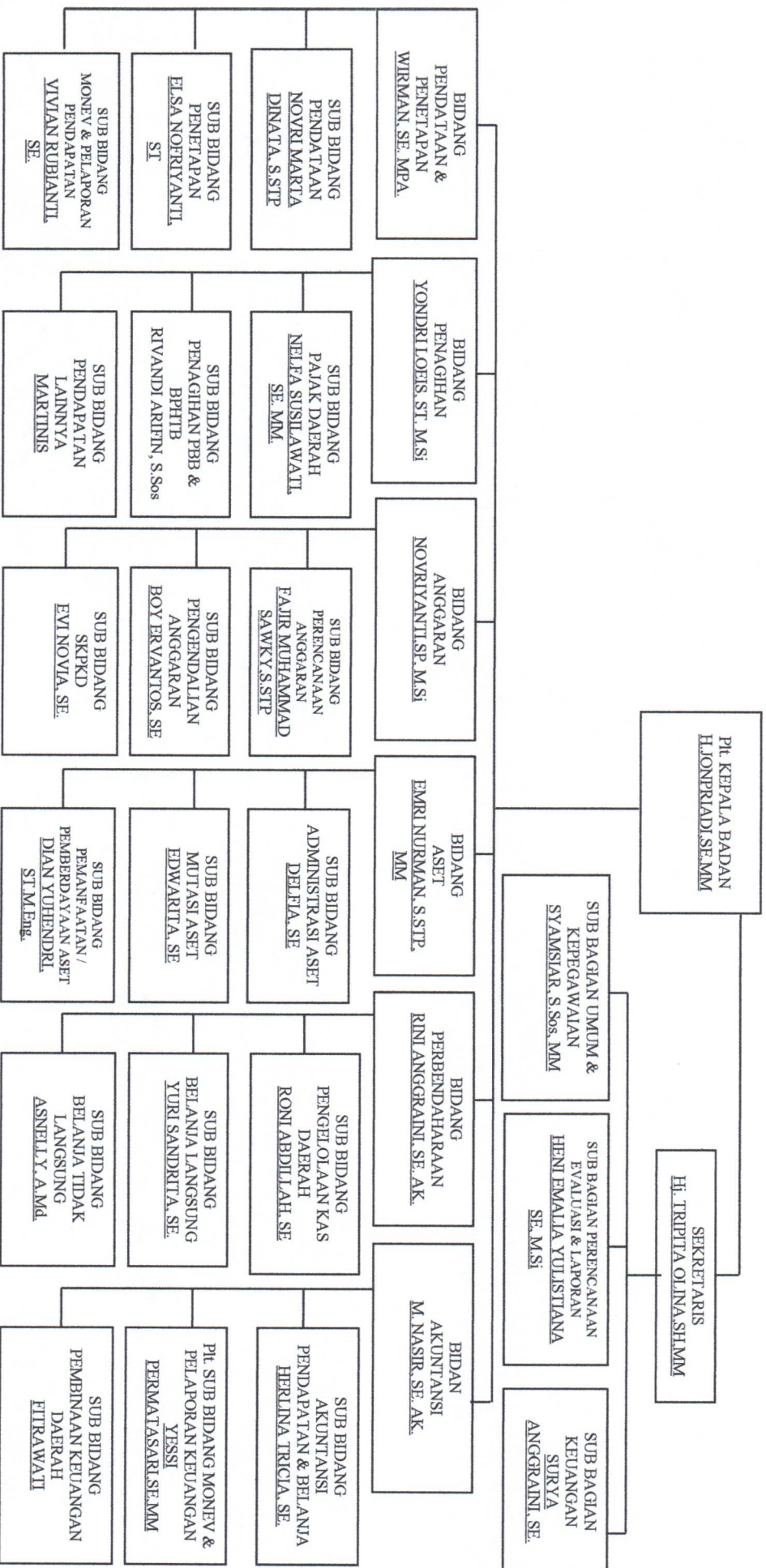
Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Penyusunan perencanaan bidang keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
3. Penyelenggara Urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan;
- d. perumusan kebijakan umum bidang Keuangan;
- e. pengendalian pelaksanaan urusan Keuangan dalam rangka mencapai target kinerja badan;
- f. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- h. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
- i. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- j. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1  
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



*Tabel 1.1*  
**STRUKTUR JABATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 MENURUT ESSELONERING**

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1.	Kepala Badan				
2.	Sekretaris		√		
3.	Kabid Penagihan		√		
4.	Kabid Pendataan		√		
5.	Kabid Perbendaharaan		√		
6.	Kabid Anggaran		√		
7.	Kabid Aset		√		
8.	Kabid Akuntansi		√		
9.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			√	
10.	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Laporan			√	
11.	Kasubag Keuangan			√	
12.	Kasubid Pajak Daerah			√	
13.	Kasubid Penagihan PBB dan BPHTB			√	
14.	Kasubid Pendapatan Lainya			√	
15.	Kasubid Pendataan			√	
16.	Kasubid Penetapan			√	
17.	Kasubid Monev Pendapatan			√	
18.	Kasubid Belanja Tak Langsung			√	
19.	Kasubid Belanja Langsung			√	
20.	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah			√	
21.	Kasubid Administrasi Aset			√	
22.	Kasubid Mutasi Aset			√	
23.	Kasubid Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset			√	

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
24.	Kasubid Perencanaan Anggaran			√	
25	Kasubid Pengendalian Anggaran			√	
26	Kasubid SKPKD			√	
27	Kasubid Akuntansi Pendapatan dan Belanja			√	
28	Kasubid Bidang Monev & Pelaporan Keuangan			√	
29	Kasubid Pembinaan Keuangan Daerah			√	
30	S t a f				14
	<b>J U M L A H</b>		<b>7</b>	<b>21</b>	<b>42</b>

Sumber : SOTK BPKD Tahun 2019

## B. PERMASALAHAN UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ada beberapa permasalahan utama yang di hadapi diantaranya:

1. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, untuk itu diperlukan biaya yang sangat besar sementara kemampuan dana sangat terbatas
2. Terbatasnya biaya operasional menyebabkan kurang lancarnya kegiatan yang kita harapkan.
3. Pengelolaan Aset daerah belum terkelola secara optimal karena belum adanya kepastian hukum tentang kewenangan yang diberikan dan jumlah aparatur untuk pengelolaan aset ini sangat terbatas.



4. Kompleksitas permasalahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang membutuhkan penanganan dini dan komprehensif
5. Masih relative kurangnya jumlah pegawai dan rendahnya SDM aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang pariaman sehingga berbagai permasalahan pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman Penanganannya belum optimal dan menyeluruh.

### **C. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Sistematika Pelaporan.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

Menyajikan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

## **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **C. Inovasi Kegiatan**

Langkah-langkah perbaikan dan berbasis IT yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah agar pelaksanaan capaian kinerja secara efektif dan efisien.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

---

**B**adan Pengelola Keuangan Daerah berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 melalui Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan komitmen yang kuat. Implementasi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2019 merupakan tahun keempat dari periode Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Untuk mencapai kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2019, Badan Pengelola Keuangan Daerah menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2019, dan menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019. Target-target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan Daerah.

**Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019**

---

#### A. RENCANA SRATEGIS

##### 1. Visi

Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merujuk kepada Visi Kabupaten Padang Pariaman dalam RPJMD tahun 2016-2021, yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru,  
Religius, Cerdas Dan Sejahtera”**

## 2. Misi

Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2016-2021 untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada misi ke 6 (Enam), yaitu :

**“Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih,  
Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur Dan  
Pelayanan Publik”**

## 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2019

Tujuan dan Sasara Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

*Tabel 2.1*  
Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2019

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur Dan Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan
			Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD
			Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT) TAHUN 2019

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah. IKU Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung oleh 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.2*  
Sasaran dan Indikator

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	<b>0</b>
2.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	<b>0</b>
3.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	<b>8,50</b>

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2019 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Indikator kinerja utama yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan sasaran strategis badan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut indikator kinerja utama daerah yang termasuk dalam perjanjian kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
3. Meningkatnya pajak daerah.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

**B**adan Pengelola Keuangan Daerah telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selama tahun 2020. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri terkait dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

*Tabel 3.1*  
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat/ Kategori
> 100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤ 100	Berhasil
80 < s.d ≤ 90	Cukup Berhasil
70 < s.d ≤ 80	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

#### A. Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2020 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Tabel 3.A.1

## Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Interpretasi
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Temuan	0	0	100	Berhasil
2.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Jumlah Temuan	0	0	100	Berhasil
3.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	Persentase	9,10%	-13,41	-147,36	Tidak berhasil

Tabel 3.A.2

## Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	2020			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Temuan	0	0	0	100	Berhasil
2.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Jumlah Temuan	0	0	0	100	Berhasil
3.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	Persentase	16,73%	9,10%	-13,41	-147,36	Tidak Berhasil

Tabel 3.A.3

## Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					%	Interpretasi
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Temuan	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	90	Cukup Berhasil
2.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Jumlah Temuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Berhasil
3.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	Persentase	5,55	7,90	8,16	8,50	9,10	16,79	36,84	12,39	16,73	-13,41	970,18	Berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2020 :

	<p><b>Sasaran 1</b> Meningkatkan Kualitas Pengelola Keuangan Daerah</p>
---	---

Sasaran 1 (satu) ini merupakan salah satu upaya mewujudkan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yang terletak pada Misi VI, yaitu terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel. Selanjutnya tujuan tersebut dicapai dengan salah satu sasaran pada RPJMD dan merupakan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2016-2021, yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. Sasaran ini didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

*Tabel 3.A.4*  
Program dan Kegiatan Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perubahan KUA PPAS	100%
		Penyusunan KUA PPAS	100%
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100%
		Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	100%
3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	100%
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	100%
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	100%
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%

No	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%
		Penunjangn Sistem informasi keuangan daerah (SIMDA)	100%
		Pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%
		Fasilitas penerbitan DPA dan SPD	100%
		Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD dan PPK bendahara	100%
		Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS dan JKN	100%
		Penyusunan standar biaya dan buku petunjuk juknis pelaksanaan APBD	100%
		Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	100%
		Penatausahaan Belanja Langsung	100%
		Persiapan Pelaksanaan Penganggaran E-Budgeting	100%
		Penatausahaan Dana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%
		Pengelolaan Kas Daerah	100%
		Pengelolaan dan Penatusahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	100%
4.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dana transfer, dana perimbangan dan bagi hasil	100%

*Tabel 3.A.5*  
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	0	0	100

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.A.5 tentang pengukuran capaian sasaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2020 capaian sasaran kinerja sangat berhasil dengan tidak adanya temuan BPK yang material terhadap laporan keuangan daerah yang dibuktikan dengan

diperolehnya Opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas LKPD tahun anggaran 2019 di tahun 2020.

Adapun kriteria yang dijadikan perhatian BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
2. Kecukupan Pengungkapan.
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping keempat kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material.

Terkait dengan penilaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sudah mengatur tentang jenis opini yang diberikan sebagai salah satu bentuk hasil audit atas laporan keuangan Daerah yang terdiri atas :

1. Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (*Unqualified Opinion*)
2. Wajar dengan Pengecualian / WDP (*Qualified Opinion*)
3. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
4. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil penilaian kerja setiap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menjelaskan informasi yang memuat data

berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

Opini LKPD ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan yang baik terhadap opini LKPD ini dari tahun ke tahun menjadi penting dari kondusifnya pemerintahan daerah yang sedang berlangsung. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 18ias saja berbeda antar entitas pemerintah daerah yang satu dengan entitas pemerintah daerah lainnya, tergantung kualitas SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, luasan wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang ada di daerah.

Perkembangan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Padang Pariaman bisa dilihat dari table dibawah ini :

*Tabel 3.A.6*  
Perkembangan Opini Laporan Keuangan  
Kabupaten Padang Pariaman  
Periode 2008 s/d 2019

<b>NO</b>	<b>LKPD TAHUN</b>	<b>OPINI</b>
1.	2008	WTP
2.	2009	WDP
3.	2010	WDP
4.	2011	WDP
5.	2012	WDP
6.	2013	WTP
7.	2014	WTP
8.	2015	WTP
9.	2016	WTP
10.	2017	WTP
11.	2018	WDP
12.	2019	WTP

*Tabel 3.A.7*  
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan tahun lalu;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	0	0	0	0

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meraih kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Temuan BPK RI

Dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun sebelumnya semua pihak terkait bersama-sama berperan aktif dalam menyelesaikan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya. Terkait tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK RI atas Laporan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan pemetaan terhadap Temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan. Status tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat berupa telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dalam proses (belum selesai tindak lanjutnya), dan belum ditindaklanjuti.

2. Peningkatan Peran APIP

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperkuatnya peran pengawasan internal pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintah, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam menjaga keandalan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. APIP juga melakukan review sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, hingga pendampingan pada saat pemeriksaan oleh BPK.

Kemudian dalam rangka pengawasan internal, inspektorat Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada kegiatan pemngawasan/audit tapi juga melakukan fungsi pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Disamping itu Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah berupaya :

1. Meningkatkan level SPIP.
  2. Meningkatkan Kapabilitas APIP.
  3. Meningkatkan Anggaran APIP sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah

Untuk mencapai suatu tata kelola keuangan daerah yang handal dan profesional juga dilakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkesinambungan berupa dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis terhadap aparatur pengelola keuangan, sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya,"

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi maka hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Padang Pariaman adalah membangun simda online yang terkoneksi dengan semua organisasi perangkat daerah di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selain kedepan aplikasi simda ini akan terintegrasi antara pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang daerah serta melaksanakan SP2D Online dengan Bank Nagari.

5. Koordinasi yang baik antara unit terkait baik internal maupun eksternal

Upaya yang tidak kalah penting dalam rangka meraih kembali opini WTP atas laporan keuangan daerah kabupaten Padang Pariaman adalah meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. "Ini sangat perlu dilaksanakan untuk keselarasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga

menjadi komitmen dari semua pihak dalam rangka memperoleh kembali opini WTP.

6. Deteksi dini potensi permasalahan yang dapat menjadi temuan pemeriksaan

Menghindari potensi temuan tahun berikutnya, maka APIP berperan aktif dalam peningkatan efektifitas sistem pengendalian intern dan pencegahan pelanggaran kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

*Tabel 3.A.8*

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

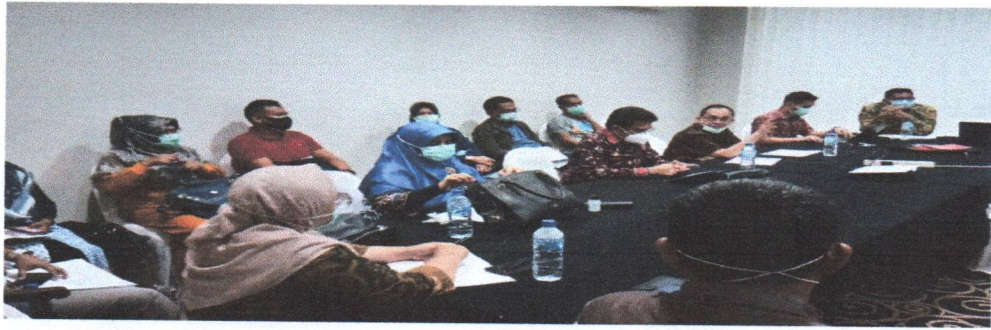
No	Indikator	Target Kinerja Sesuai RENSTRA ( selama 5 Tahun)					Akumulasi Kinerja s.d Tahun n	Pencapaian untuk n + 1
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	0	0	0	100%	90%

*Gambar Saat Rapat Kesepakatan APBD Bersama Eksekutif dan Legislatif*





*Gambar Saat Rapat TAPD Pembahasan Anggaran*



*Gambar Saat Penyerahan Ranperda APBD*



*Gambar Pada Saat Asistensi kebijakan Akuntansi dengan BPKP Perwakilan Sumbar*



*Gambar Pada Saat Penyusunan Draf Kebijakan Akuntansi*





*Gambar Pada Saat Simulasi SIPD Kemendagri, Jakarta 12 November 2020*



*Gambar Pada Saat Sosialisasi JKN KIS*



*Gambar Pada Saat Sosialisasi Transfer*



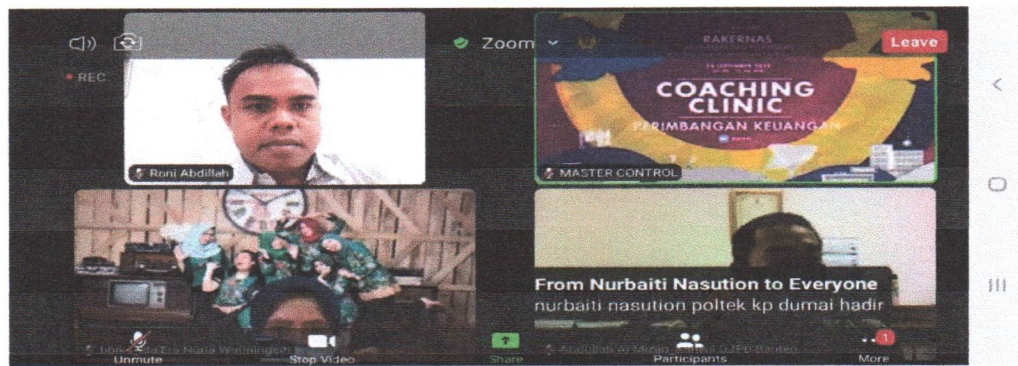
*Gambar Pada Saat Webinar Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2021 bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah, 13 Oktober 2020*



*Gambar Pada Saat Webinar Pengelolaan TKDD yang Akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat (bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu)*



*Gambar Pada Saat Zoom Meeting Coaching Clinic Perimbangan Keuangan*





## Sasaran 2

### Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Sasaran 2 (dua) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang bersih dan akuntabel. Pengelolaan asset daerah ini menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan Badan Pengelola keuangan Daerah dalam mencapai sasaran RPJM tahun 2016-2021, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Padang Pariaman, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.A.9  
Program dan kegiatan sasaran

No	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Aset/ Barang Daerah	100 %
		Penghapusan dan Pelelangan BMD	100 %
		TP-TGR	100 %
		Implementasi Simda BMD	100 %
		Kodefikasi dan Pencekingan Aset	100 %
		Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	100 %
		Implementasi Aplikasi Persediaan	100 %

*Tabel 3.A.10*  
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	%
Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	100%

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BPKD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD dan pembantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya, maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan pengelolaan aset daerah.

Setiap OPD atau unit kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang daerah harus melakukan penatausahaan aset. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang disusun laporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Padang Pariaman melalui Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah dan menjadi laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Wewenang dan tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD.

Capaian Indikator Kinerja ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Selama tahun 2020 dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan workshop pengurus barang guna meningkatkan pemahaman atau pengetahuan pengurus barang seluruh OPD/ unit kerja dalam pengelola BMD sehingga diharapkan seluruh pengurus barang disemua OPD dalam melaksanakan tugas secara tertib, efektif, efisien, dan taat pada aturan yang berlaku.
2. Tewujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara akurat, cepat, efisien, dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mempergunakan sistem informasi manajemen yang konprehensif dan handal, yaitu dengan memanfaatkan Simda BMD yang dibuat oleh BPKP. Penggunaan aplikasi simda BMD dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Mulai tahun 2018 aplikasi simda BMD bisa diakses secara on line sehingga memudahkan OPD dalam menginput atau memonitoring kondisi asset.
3. Hasil inventarisasi Barang Milik Daerah dibuat berdasarkan daftar rekapitulasi inventaris yang dibuat dan dilaporkan dari seluruh OPD (44 OPD) sebagai pengguna barang secara periodik yaitu semesteran dan tahunan dalam bentuk laporan asset daerah.
4. Salah satu pengelolaan aset daerah adalah penghapusan, lelang dan pemindahtanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya. Pemindahtanganan adalah pengalihan Kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara lelang/dijual, dipertukarkan, dihibahkan

atau disertakan sebagai modal Pemerintah. Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan. Selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharanya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

5. Telah dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga atas barang / aset daerah yang yang bisa dipinjam pakaikan.
6. Sebagai tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui Bidang Aset telah melaksanakan Sidang TP-TGR terhadap pegawai yang belum menyelesaikan temuan yang dilaporkan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.

### **Permasalahan**

Penyebab belum memadainya tata kelola aset tetap yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya kerjasama dengan OPD terkait tentang pemaikaian aset daerah.
2. Masih terdapat beberapa OPD/ Unit Kerja belum menganggap pengurusan barang milik daerah sebagai hal penting dan menjadi prioritas,
3. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat yang berdampak atas keakuratan laporan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan neraca Kabupaten Padang Pariaman,
4. Dokumen barang milik daerah sebagian tidak ada,
5. Keterbatasan SDM pengelola barang milik daerah pada SKPD/Unit Kerja.



## Solusi

1. Membangun komitmen seluruh kepala OPD/Unit Kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah beserta seluruh jajarannya untuk melakukan tata kelola aset daerah dibawah kekuasaan secara tertib administrasi.
2. Melakukan rekon asset dan monitoring ke OPD-OPD untuk memantau kondisi pengelolaan asset oleh OPD.
3. Dalam meningkatkan keterbatasan SDM pengelola BMD antara lain melaksanakan secara rutin *Workshop* untuk pengelola barang milik daerah.

*Tabel 3.A.11*

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan tahun lalu;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	0	0

*Tabel 3.A.12*

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator	Target Kinerja Sesuai RENSTRA ( selama 5 Tahun)					Akumulasi Kinerja s.d Tahun n	Pencapaian untuk n + 1
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	0	0	0	100%	100%

*Gambar Pada Saat Penyerahan Sertifikat oleh BPN*




*Gambar Pada Saat Pelaksanaan Sidang TP-TGR Tahun 2020*



*Gambar Pada Saat Pemusnahan Barang Milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Padang Pariaman*



	<p><b>Sasaran 3</b></p> <p>Meningkatnya Pajak Daerah</p>
--	--

Sasaran 3 (tiga) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak. Kontribusi sektor pajak sangat diharapkan dalam menambah pendapatan daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Mengingat besarnya kontribusi pajak terhadap keuangan daerah, maka upaya yang dilakukan Badan Pengelola keuangan Daerah untuk mencapai sasaran 3 (tiga) ini perlu didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

*Tabel 3.A.13*  
Program dan kegiatan sasaran 3

No	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	100%
		Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	100%
		Pemutakhiran Data Pajak	100%

	Sosialisasi PBB dan BPHTB	100%
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	100%
	Sosialisasi Cukai Tembakau	100%
	Operasional Pemungutan PAD	100%
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah	100%

*Tabel 3.A.14*  
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran

Indikator Kinerja	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase Kenaikan Pajak Daerah	9,10%	-13,41	-147,36

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas tentang pengukuran capaian sasaran 3 terlihat penurunan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun, secara realisasi capaian target penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2020 dapat direalisasikan dengan sangat tinggi yaitu 102,18%. Penyebab terjadinya penurunan peningkatan pajak daerah adalah terjadinya penurunan target penerimaan pajak daerah yang disebabkan adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional maka dilakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing kabupaten/kota. Penyesuaian terhadap target PAD tersebut adalah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi daerah tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Namun disisi lain juga masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan dilapangan, sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah tentang kewajiban pembayaran pajak.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pemungutan dan penyetoran pajak.
3. Sosialisasi perpajakan masih kurang efektif.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi personil dilapangan, namun tidak mengurangi realisasi persentase penerimaan pajak daerah.

*Tabel 3.A.15*

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan tahun lalu;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	8,50	16,73	9,10	-13,41

*Tabel 3.A.16*

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	16,79	36,89	12,37	16,73	-13,41

Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak merupakan salah satu pendapatan yang berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan tabel diatas terjadi kenaikan pajak daerah yang cukup tinggi dari tahun 2016 s/d 2019, sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah pada APBD Padang Pariaman. Kenaikan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 36,89%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak daerah yang disebabkan wabah COVID 19 yang berdampak terhadap perekonomian global. Namun, secara realisasi

anggaran pada tahun 2020 mencapai realisasi yang sangat tinggi, yaitu 102,17% atau melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020.

*Tabel 3.A.17*

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator	Target Kinerja Sesuai RENSTRA (selama 5 Tahun)					Akumulasi Kinerja s.d Tahun n	Pencapaian untuk n + 1
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	5,55%	7,90%	8,16%	8,50%	9,10%	7,84%	13,87%

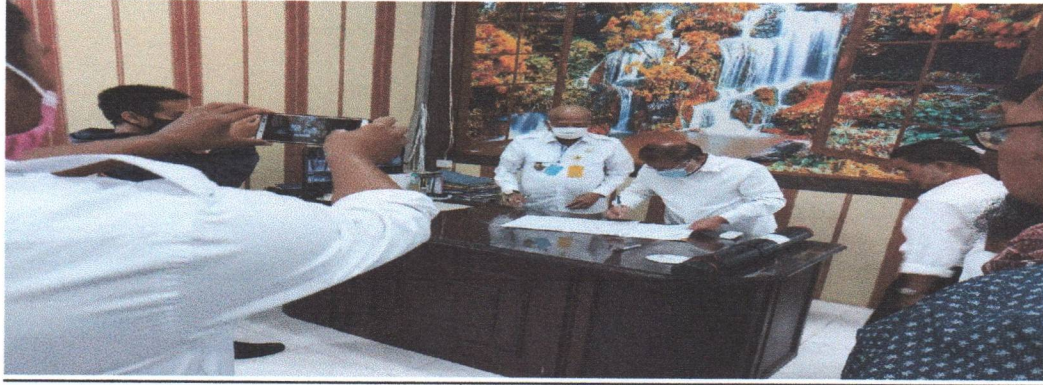
Target kinerja RPJMD yang dituangkan melalui renstra BPKD tahun 2016-2021 terlihat akumulasi target sampai dengan tahun 2020 sebesar 7,84%. Melalui berbagai upaya dan kegiatan untuk mendukung sasaran strategis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sehingga pencapaian sampai dengan tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 13,87%.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah selama tahun 2020 dalam upaya peningkatan pajak daerah antara lain sebagai berikut :

1. Pemasangan baliho tentang himbauan kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam membayar PBB sebelum jatuh tempo.
2. Pemasangan spanduk di seluruh kecamatan (17 Kecamatan) yang berisi himbauan kepada warga desa membayar pajak PBB sebelum jatuh tempo.
3. Dalam rangka terciptanya pengelolaan PBB di Kabupaten Padang Pariaman dengan baik dan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo selain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas juga diselenggarakan acara sosialisasi kepada seluruh Kecamatan, Nagari. Acara sosialisasi

PBB dimaksudkan meningkatkan peran serta aparat pengelola PBB mulai dari Desa, Nagari, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah dari PBB.

Gambar Pada Saat Acara penandatanganan PKS Pemda dengan BPN



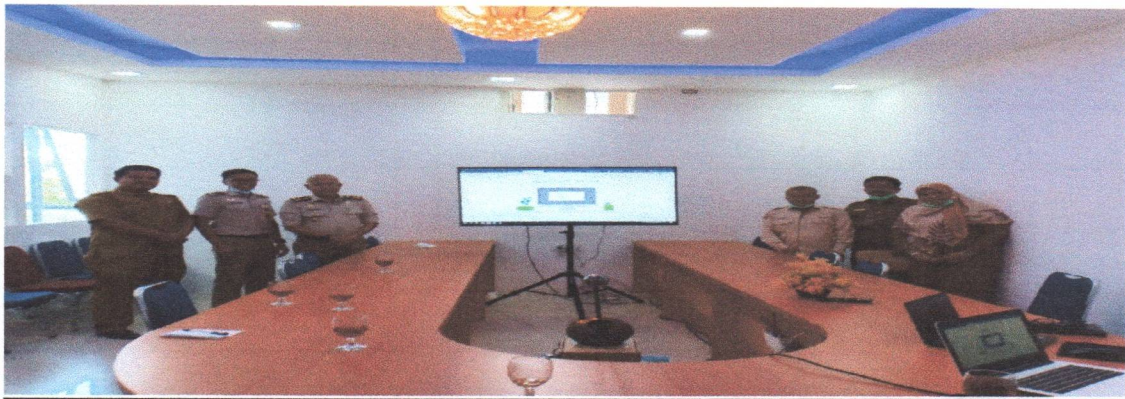
Gambar Pada Saat Ini acara koordinasi dengan pihak bank nagari utk pengintegrasian aplikasi BPHTB online dengan bank nagari cabang utama Padang



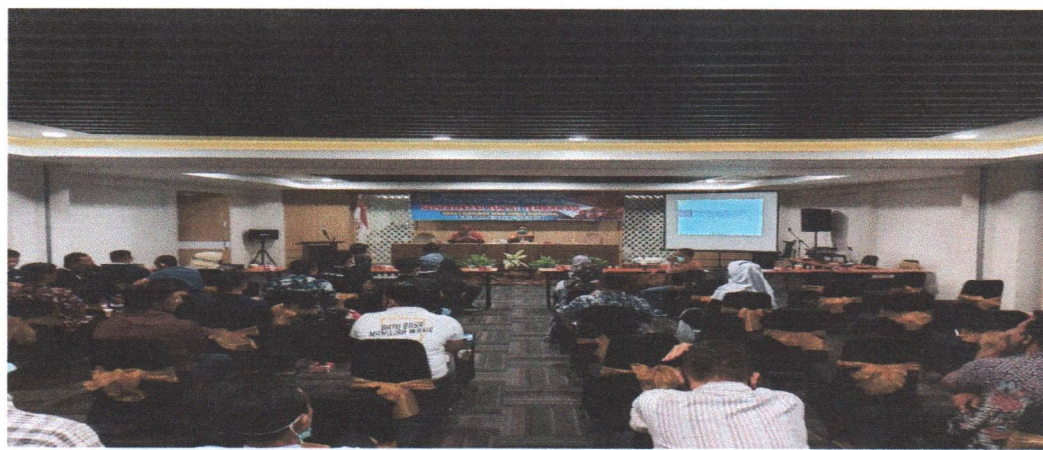
Gambar Pada Saat Ini Acara User Acceptance Test aplikasi E BPHTB dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang dihadiri kominfo dan BPKD



Gambar Pada Saat uji coba aplikasi BPHTB online bersama Diskominfo dan BPN



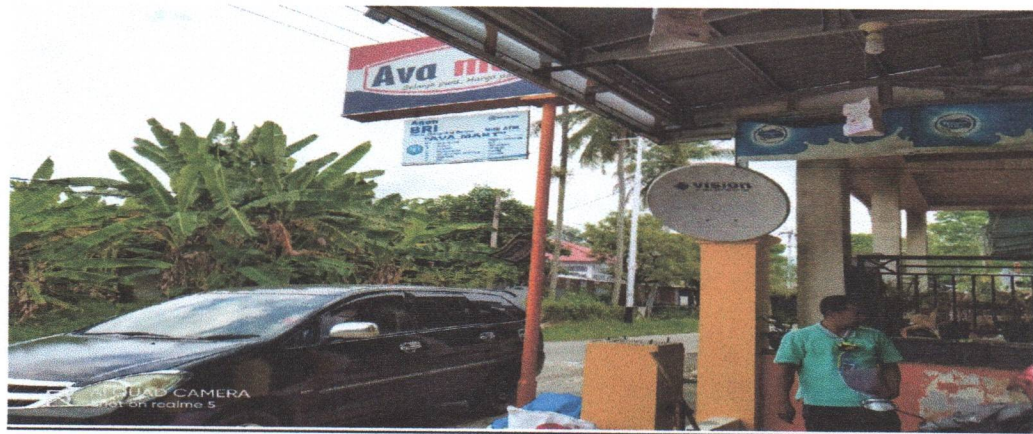
Gambar Pada Saat Acara Sosialisasi Cukai Tembakau dengan Nagari Se-Kab. Padang Pariaman di Hotel Grand Bunda Bukittinggi



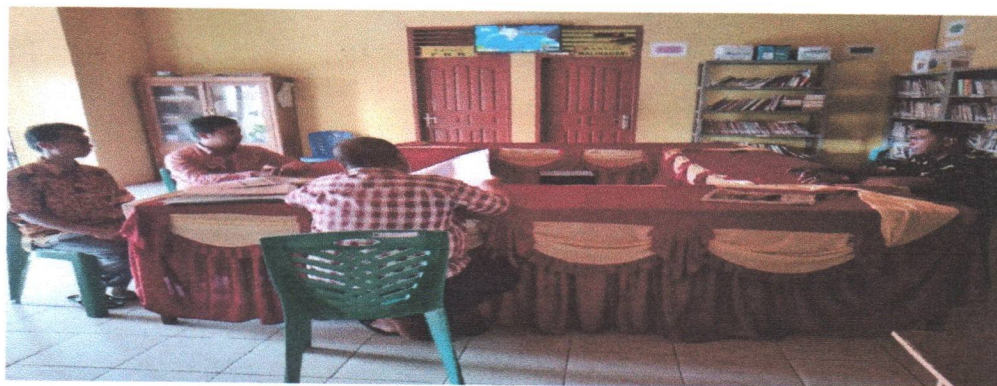




*Gambar Pada Saat Pendataan Pajak Daerah*



*Gambar Pada Saat Sosialisasi Pemutakhiran Data PBB di Nagari Campago Kampung Dalam*



## B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bagian depan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis maka belanja tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Padang Pariaman terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung, yang dialokasikan belanja sebesar Rp. 12.308.179.371,96 dengan realisasi 11.503.315.828,- atau 93,46% dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 5.614.650.804,14,- dengan realisasi 5.752.776.027,- atau 95,75% dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.693.528.567,82 dengan realisasi 6.127.333.638,00 atau 91,54%.

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dapat dilihat pada realisasi keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

*Tabel 3.B.1*  
Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.506.071.800,00</b>	<b>1.471.742.223,00</b>	<b>97,72</b>	<b>34.329.577,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	248.500.000,00	247.947.520,00	99,78	552.480,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.465.000,00	141.754.253,00	87,79	19.710.747,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /operasional	8.462.800,00	5.864.650,00	69,30	2.598.150,00
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	249.000.000,00	242.405.500,00	97,35	6.594.500,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48.200.000,00	48.189.300,00	99,98	10.700,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.000.000,00	17.758.300,00	84,56	3.241.700,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.030.000,00	10.120.000,00	91,75	910.000,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.514.000,00	19.011.900,00	97,43	502.100,00
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	213.000.000,00	212.990.000,00	100,00	9.200,00
10	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran*)	529.900.000,00	525.700.000,00	99,96	200.000,00
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>571.860.000,00</b>	<b>526.152.093,00</b>	<b>92,01</b>	<b>45.707.907,00</b>
11	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	120.000.000,00	116.500.000,00	97,08	3.500.000,00
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	221.160.000,00	221.089.485,00	99,97	70.515,00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	54.750.000,00	43.693.200,00	79,80	11.056.800,00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	146.000.000,00	115.448.408,00	79,07	30.551.592,00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	29.950.000,00	29.421.000,00	98,23	529.000,00
<b>C.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>70.952.898,00</b>	<b>70.541.100,00</b>	<b>99,42</b>	<b>411.798,00</b>
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	70.952.898,00	70.541.100,00	99,42	411.798,00
17	Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD	-	-	-	-
<b>D.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>243.221.000,00</b>	<b>219.502.491,00</b>	<b>90,25</b>	<b>23.718.509,00</b>
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	72.980.112,00	97,31	2.019.888,00
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	9.031.000,00	8.948.500,00	99,09	82.500,00
20	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	85.050.000,00	67.175.500,00	78,98	17.874.500,00
21	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	62.340.000,00	59.927.879,00	96,13	2.412.121,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
22	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	11.800.000,00	10.470.500,00	88,73	1.329.500,00
<b>E.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>3.083.720.206,14</b>	<b>2.972.418.933,00</b>	<b>96,39</b>	<b>111.301.273,14</b>
23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Restribusi	6.368.000,00	5.265.000,00	82,68	1.103.000,00
24	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	833.001.203,14	814.584.550,00	97,79	18.416.653,14
25	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	63.200.000,00	53.779.425,00	85,09	9.420.575,00
26	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	64.185.458,00	50.289.794,00	78,35	13.895.664,00
27	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	31.480.000,00	26.475.599	84,10	5.004.500,00
28	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	48.360.300,00	47.701.950,00	98,64	658.350,00
29	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	44.133.700,00	43.848.125,00	99,35	285.575,00
30	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)	35.340.000,00	33.852.500,00	95,79	1.487.500,00
31	Penyusunan Laporan Aset/Barang Daerah	52.650.000,00	52.143.510,00	99,04	506.490,00
32	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah	58.235.000,00	57.995.850,00	99,59	239.150,00
33	TP-TGR	9.230.000,00	8.351.700,00	90,48	878.300,00
34	Implementasi Simda Barang Milik Daerah	30.000.000,00	29.291.700,00	97,64	708.300,00
35	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	204.700.000,00	166.495.100,00	81,34	38.204.900,00
36	Fasilitas Penerbitan DPA dan SPD	2.500.000,00	1.750.000,00	70,00	750.000,00
37	Sosialisasi PBB dan BPHTB	77.525.000,00	77.147.400,00	99,51	377.600,00
38	Kodefikasi dan Pencekingan Aset	17.500.000,00	17.254.600,00	98,60	245.400,00
39	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk PPK dan bendaharawan	29.520.000,00	24.148.750,00	81,80	5.371.250,00
40	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	55.000.000,00	54.658.000,00	99,38	342.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
41	Sosialisasi Cukai Tembakau	174.579.545,00	174.357.000,00	99,87	222.545,00
42	Implementasi Aplikasi Persediaan	10.500.000,00	10.364.200,00	98,71	135.800,00
43	Operasional Pemungutan PAD	453.900.000,00	452.764.500,00	99,75	1.135.500,00
44	Penyusunan Standar Biaya dan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD	21.860.000,00	20.678.000,00	94,59	1.182.000,00
45	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	33.150.000,00	32.246.600,00	97,27	903.400,00
46	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	31.800.000,00	31.679.000,00	99,62	121.000,00
47	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS dan JKN	15.500.000,00	15.475.000,00	99,84	25.000,00
48	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	51.000.000,00	50.812.559,00	99,63	187.441,00
49	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	122.500.000,00	121.649.600,00	99,31	850.400,00
50	Persiapan Pelaksanaan Penganggaran E-Budgeting	177.500.000,00	170.026.866,00	95,79	7.473.134,00
51	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00	200.000,00
52	Pengelolaan Kas Daerah	31.500.000,00	31.499.129,00	100,00	871,00
53	Pemutakhiran Data Pajak	70.000.000,00	69.642.725,00	99,49	357.275,00
54	Penatausahaan Belanja Langsung	47.100.000,00	46.912.000,00	99,60	188.000,00
55	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	42.712.000,00	42.563.000,00	99,65	149.000,00
56	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	117.190.000,00	116.915.300,00	99,77	274.700,00
<b>F.</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>35.824.900,00</b>	<b>35.638.100,00</b>	<b>99,48</b>	186.800,00
57	Pengelolaan Dana Transfer, Dana Perimbangan dan Bagi hasil	35.824.900,00	35.638.100,00	99,48	186.800,00
<b>G.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>79.987.250,00</b>	<b>77,66</b>	23.012.750,00
58	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	50.000.000,00	32.335.500,00	64,67	17.664.500,00
59	Penyusunan KUA dan PPAS	53.000.000,00	47.651.750,00	89,91	5.348.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.614.650.804,14</b>	<b>5.375.982.190,00</b>	<b>95,75</b>	<b>238.668.614,14</b>

### C. Inovasi Kegiatan

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan publik
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- c. Peningkatan daya saing daerah

Bentuk inovasi daerah meliputi : inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada tabel berikut beberapa inovasi yang telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2016-2020 :

Dari tabel diatas terlihat langkah perubahan yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Padang Pariaman didalam mencapai sasaran strategis dibidang keuangan. Inovasi daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman yang tertuang didalam RPJMD tahun 2016-2021 terus dilakukan dengan beberapa rencana inovasi kedepan, sebagai berikut :

*Tabel III.C.1*

Inovasi-inovasi yang akan dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

<b>NO</b>	<b>INOVASI</b>
1.	Pembayaran Pajak BPHTB On Line dengan BPN
2.	Tapping Box Pajak
3.	Integrasi Simda Gaji dengan Simda Keuangan
4.	SP2D On Line

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem akuntabilitas kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020 adalah :

1. Penatausahaan perbendaharaan yang akuntabel dan sesuai peraturan atas pertanggungjawaban pencairan anggaran.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan OPD yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Semakin baiknya kualitas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Persentase peningkatan TGR.
5. Peningkatan data pajak yang akurat.
6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2020 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2020 ini.

## **B. Langkah ke depan**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah serta peningkatan pajak daerah melalui program-program unggulan seperti program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
2. Peningkatan Sinergitas Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Fokus terhadap pencapaian target kinerja yang akuntabel dan bisa terukur.
4. Persentase peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pengelolaan keuangan daerah.
5. Melakukan beberapa inovasi dalam mencapai sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah.
6. Meningkatkan kerjasama dibidang pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah.
7. Mengembangkan teknologi informasi dibidang pengelolaan keuangan agar saling terintegrasi.
8. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah melalui pembinaan berupa bimbingan teknis.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah mengharapkan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah



Daerah Padang Pariaman, masyarakat umumnya maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Parit Malintang, 26 Januari 2021

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**TASLIM LETER, SE. Ak**

**NIP. 19740715 200212 1 011**